



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 761/III/2013

I/MARET 2013



Komisi VIII Minta Pemerintah Turunkan Biaya Transportasi Haji

KEGIATAN DPR-RI AWAL MARET 2013

Kegiatan AKD DPR-RI pada awal bulan Maret ini tetap terfokus pada berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, serta kegiatan penetapan pejabat publik.

Berikut adalah beberapa poin penting kegiatan DPR awal Maret 2013.

Kegiatan Bidang Legislasi

Kegiatan bidang ini masih terus dilanjutkan oleh Komisi-Komisi/Baleg/Pansus untuk mempersiapkan 16 (enambelas) RUU yang akan diselesaikan pada Masa Sidang III tahun sidang 2012-2013. Ke-16 RUU yang ditargetkan tersebut adalah: *pertama*, 9 (sembilan) produk Komisi II, yaitu: RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (akan dituntaskan krusial poin pada minggu-minggu terakhir dengan Pemerintah); RUU tentang Pilkada; dan 7 (tujuh) RUU Pemekaran Wilayah. *Kedua*, 3 (tiga) RUU Produk Komisi VII, yaitu: RUU tentang Antarksa; 2 (dua) RUU Konvensi yaitu Rotterdam dan Nagoya. *Ketiga*, 4 (empat) RUU Produk Pansus, yaitu: RUU tentang Organisasi Masyarakat (Ormas); RUU tentang Jabatan Notaris; RUU tentang Pembalakan Liar (masalah kelembagaan masih akan dituntaskan); RUU tentang Jaminan Produk Halal (beberapa substansi akan dituntaskan).

RUU-RUU yang masih memiliki *pending matters* dan sudah diperpanjang lebih dari 4 (empat) kali, sudah diangkat dalam forum konsultasi Pimpinan Dewan dengan Pemerintah (Presiden) pada tanggal 25 Februari, yang diharapkan dapat menuntaskan beberapa substansi dari beberapa RUU tersebut. Hambatan dalam penyelesaian RUU menjadi tanggungjawab bersama, tidak hanya tanggung jawab DPR, tapi juga Pemerintah, sesuai dengan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Perkembangan pembahasan RUU tentang Organisasi Masyarakat (Ormas), masih ada satu masalah krusial yang masih belum mendapat titik temu, yaitu **mengenai sanksi penghentian sementara kegiatan Ormas**. Dalam masalah ini, Fraksi PKS bersikukuh menolak klausul penghentian se-

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



mentara kegiatan Ormas. Fraksi ini mempersoalkan norma penghentian sementara yang menjadi kewenangan Pemerintah, sebagai sesuatu yang represif. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk memberikan sanksi penghentian kegiatan sementara, berpotensi dapat "diselewengkan". Pemerintah dapat menggunakan alasan subjektif untuk dapat menajutahkan sanksi, oleh karena itu, Fraksi PKS masih belum memberikan persetujuan.

Sementara itu, RUU Kumulatif Terbuka yang ditangani oleh Komisi VII adalah RUU tentang Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumberdaya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati (RUU tentang pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*). Berkaitan dengan ini, Komisi VII telah melakukan

RDPU untuk mendapatkan masukan, diantaranya dengan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI), Direktur Eksekutif *The Indonesian Center for Biodiversity and Biotechnology* (ICBB) dan Direktur Eksekutif *Indonesian Center for Environmental* (ICEL). Catatan dari hasil rapat DPR ini, pada intinya adalah, mereka mengusulkan agar RUU ini dapat diratifikasi secepatnya menjadi UU. Mereka juga mengusulkan agar Pemerintah dapat memastikan kesiapan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya genetik, termasuk masalah kelembagaannya setelah Protokol Nagoya diratifikasi. ICBB mengusulkan agar, Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap

Naskah Akademik RUU Protokol Nagoya.

Kegiatan Bidang Pengawasan

Rapat Tim Pengawas Tim Century dengan KPK pada 27 Februari 2013, menyimpulkan dua hal; *pertama*, Timwas Century memberikan apresiasi dan dukungan atas upaya yang telah dilakukan KPK dalam mengungkap dan menyelesaikan penanganan kasus korupsi pada Bank Century. Namun Timwas Century menilai, KPK belum cukup cepat menangani kasus korupsi tersebut. Untuk itu, Timwas mendorong KPK mengambil langkah cepat dan tepat dalam menuntaskan kasus korupsi pada Bank Century, mengingat penanganan kasus Bank Century telah berlangsung cukup lama. *Kedua*, mendorong KPK melakukan penyidikan secara menyeluruh terhadap semua pihak yang terindikasi terlibat kasus korupsi pada Bank Century sepanjang didukung dengan alat bukti yang cukup, mengingat keputusan Bank Indonesia berazaskan kolektif dan kolegial.

Komisi VIII DPR telah melakukan Raker dengan Menristek RI beserta para Kepala LPNK, dan RDP dengan Ketua Komite Inovasi Nasional pada 27 Februari. Agenda rapat adalah evaluasi kinerja tahun 2012 dan rencana kerja 2013. Kesimpulannya diantaranya, *pertama*, Komisi VII dapat menerima Laporan Kinerja Kementerian Ristek dan LPNK 2012, dan memberikan apresiasi terhadap realisasi penyerapan anggaran yang tinggi diatas 90% dengan beberapa catatan. *Kedua*, Komisi VII mengharapkan Kemenristek dan LPNK lebih meningkatkan kinerjanya, terutama pada kegiatan 2012 yang belum mencapai target seperti survei batimetri lepas pantai, batimetri pantai dari target 113,680 km terealisasi hanya 44.220 km, pembangunan simpul jaringan dari target 116 simpul hanya terealisasi 75 simpul. Penggunaan sains antariksa, dari target 61 instansi terealisasi hanya 36 instansi. Karya ilmiah tentang teknologi roket, dari target 60 terealisasi hanya 36 karya ilmiah. Komisi VII juga meminta pernyataan tertulis terkait deseminasi hasil litbang iptek nuklir, khususnya mengenai persepsi masyarakat atas sosialisasi pembangunan PLTN.

Raker Komisi VII dengan Menteri LH pada 26 Februari, dengan agenda evaluasi kinerja 2012 dan rencana kerja 2013, antara lain menyimpulkan: Komisi VII menerima kinerja Kementerian LH dan mengapresiasi manajemen pengelolaan keuangan yang memperoleh opini WTP, namun diharapkan, dari sisi serapan anggaran, khususnya untuk dana dekonstruksi yang hanya mencapai 74,11%, agar dapat dioptimalkan pada 2013. Meminta Kementerian LH, menyelesaikan seluruh Peraturan Perundang-Undangan sebagai amanah UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, paling lambat pada Desember 2013, serta menyelesaikan draft Naskah Akademis RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik (PSDG). Komisi VII mendesak menteri meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di seluruh wilayah Indonesia yang berpredikat sedang dan rendah, termasuk daerah rawan bencana. Komisi VII meminta agar kementerian LH mempublikasikan dokumen ijin lingkungan dan ijin pengelolaan limbah (B3) setiap kegiatan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai bentuk transparansi dan tanggungjawab sosial pada masyarakat.

Penetapan Pejabat Publik

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, AKD melakukan kegiatan untuk melaksanakan *fit and proper test* atas pejabat publik yang menjadi kewenangan DPR untuk menetapkannya, diantaranya adalah penetapan calon Hakim Konstitusi pengganti Prof. Mahfud MD, yang akan mengakhiri masa tugasnya pada 1 April 2013. Melalui voting yang dilakukan pada Sidang Komisi III pada 4 Maret 2013, telah ditetapkan Prof. Arief Hidayat sebagai calon Hakim Konstitusi.

Prof. Arief Hidayat adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Ia mendapat kepercayaan untuk duduk menjadi anggota Hakim Konstitusi karena dianggap cakap untuk mengemban tugas ini. Adapun Ketua MK akan dipilih diantara para anggota. Makalah yang diangkat oleh prof Arief Hidayat adalah "*Prinsip Ultra Petita Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Proses lebih lanjut atas hasil *fit and proper test* akan dilakukan sesuai dengan Tata-Tertib dan prosedur DPR.

Calon Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018 telah disampaikan Presiden RI melalui suratnya tanggal 22 Februari 2013. Atas Keputusan Bamus, Komisi XI diminta untuk memproses lebih lanjut. Adapun calon yang diusulkan untuk menggantikan Gubernur BI sekarang, Dr. Darmin Nasution yang memiliki masa tugas 2008-2013 dan berakhir pada 22 Mei 2013, diusulkan satu nama yaitu Agus D.W Martowadoyo yang saat ini menjabat menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II. Komisi XI telah melakukan rapat intenal untuk membahas usulan calon Gubernur BI tersebut, dan direncanakan pada tanggal 25 Maret 2013 akan dilakukan *fit and proper test*, namun komisi XI juga mengusulkan kepada Presiden apabila ada calon alternatif.

Pembahasan calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional sesuai UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diusulkan untuk ditangani oleh Komisi VI. Ada 23 (duapuluh tiga) calon yang diajukan oleh Presiden. Menurut Pasal 35 UU tersebut, Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang kurangnya 15 (limabelas) orang dan sebanyakbanyaknya 25 (duapuluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur. Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama (3) tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Diplomasi Parlemen

Pada Kamis 28 Februari 2013, Ormas NU dan Kedutaan Azerbaijan, mengadakan diskusi mengenai Pembantaian Khojaly. Pembantaian Khojaly adalah pembantaian dalam jumlah besar etnis Azerbaijan di Kota Khojaly pada tanggal 25 Februari 1992 selama Perang Nagorno Karabakh.

Menurut Pemerintah Azerbaijan, *Human Rights Watch* dan pengamat internasional lainnya, pembantaian dilakukan oleh angkatan bersenjata Armenia dengan bantuan Rusia. Jumlah kematian akibat pembantaian ini adalah sekitar 613 penduduk, dengan 106 wanita dan 83 anak-anak. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Tamerlan Karayev menuntut keadilan dari dunia internasional untuk menegakkan keadilan bagi korban “*Khojaly Genocide*” serta peristiwa kebrutalan lainnya di seluruh dunia.

Ketua DPR-RI menyampaikan sambutan pada acara tersebut, menilai bahwa masalah kejahatan kemanusiaan tak hanya terjadi di tanah air, tetapi juga di belahan dunia yang lain. Salah satunya yakni kasus Genosida atau pembantai-

an terhadap umat muslim Azerbaijan di Khojaly. Ketua DPR mengatakan, kejahatan kemanusiaan tak hanya bertentangan dengan hukum internasional, tetapi juga bertentangan dengan hukum dasar dan UUD 1945. Indonesia terus mendorong PBB untuk menyelesaikan masalah Armenia dan Azerbaijan, sebab kedua negara tersebut berada di persimpangan Eropa yang berpotensi membawa kemajuan perekonomian nasional. Saat ini Azerbaijan tengah berjuang mencari keadilan, dan DPR sepakat masukkan masalah Armenia dan Azerbaijan, dan membuat deklarasi meminta tindak lanjut DK PBB. Indonesia bagian dari OKI dan PUIC yang sangat berkepentingan terhadap perdamaian di negara Azerbaijan.**

Komisi VIII Minta Pemerintah Turunkan Biaya Transportasi Haji



Menteri Perhubungan EE Mangindaan dan Dirjen PHU Kementerian Agama Anggito Abimanyu dalam raker dengan Komisi VIII DPR RI.

Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Perhubungan RI, EE Mangindaan dan Dirjen PHU Kementerian Agama, Anggito Abimanyu untuk menurunkan biaya transportasi haji. Hal tersebut terkait dengan laporan Menteri Perhubungan tentang biaya penyelenggaraan Angkutan Udara Haji tahun ini sebesar 2,151 dolar AS per Jamaah. Hal itu dikatakan Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah saat memimpin Raker dengan Kemenhub dan Dirjen PHU Kemenag. Rabu (6/3) di Jakarta.

Menanggapi permintaan komisi VIII tersebut, EE Mangindaan mengatakan bahwa tahun lalu ongkos atau biaya pesawat layanan haji tahun 2012 sebesar 2,210 dolar AS dan tahun ini sekitar 2,151 dolar AS. Sehingga bisa dikatakan relatif stabil. Ditambahkannya biaya pesawat layanan haji itu tergantung pada harga avtur (*Aviation Turbine Fuel*) dan sewa pesawat.

“Kalau avtur turun, maka ongkos juga turun. Selain itu juga tergantung pada harga sewa pesawat,”katanya. Dikatakan Mangindaan khusus untuk perjalanan Haji, saat ini PT Garuda sebagai maskapai resmi penyelenggaraan haji Indonesia menyewa 19 pesawat dimana 14 pesawat inti dan 5 lainnya sebagai *back up* atau cadangan jika pesawat inti mengalami masalah.

Atas jawaban tersebut, Komisi VIII menyarankan agar Kementerian Perhubungan melakukan negosiasi dan koordinasi dengan PT Pertamina dalam rangka menekan harga Avtur. Selain itu koordinasi juga harus dilakukan pihak Kementerian Perhubungan dengan pihak Angkasa Pura untuk menekan biaya jasa pelayanan jamaah haji di bandara. Hal tersebut akan tidak membebankan jamaah haji.

“Kami meminta Kementerian Perhubungan melakukan pendekatan dengan maskapai penerbangan untuk menekan harga penerbangan haji agar tidak semata-mata bersifat bisnis. Bahkan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama juga harus membuka kesempatan bagi perusahaan lain untuk membuka kesempatan bagi perusahaan penerbangan lain untuk ikut tender dalam memberikan pelayanan angkutan udara jamaah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan,” papar Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah.

Hal tersebut menurut Ida dalam rangka melihat maskapai penerbangan mana yang bisa memberikan harga murah namun dengan pelayanan yang maksimal. Ditambahkan Anggota Komisi VIII dari Fraksi Golkar, Humaedi, jika diperlukan kementerian perhubungan harus memberikan sanksi yang tegas bagi pihak Garuda atau maskapai penerbangan lainnya yang tidak maksimal dalam memberikan pelayanan bagi jamaah haji.

“Dari tahun ke tahun keterlambatan penerbangan semakin lama, hal ini tentu sangat menyengsarakan jamaah yang menunggu. Jika perlu beri *Punishment* bagi maskapai penerbangan tersebut,” tegas Humaedi.

Menanggapi hal tersebut Menteri Perhubungan mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait berkenaan dengan penurunan biaya perjalanan haji.

“Untuk tender, dalam daftar kami terdapat empat maskapai penerbangan yang ikut andil dalam penyelenggaraan ibadah haji, Garuda, Saudi Airlines, Air Asia dan Aviastar. Namun Air Asia hanya mampu dua embarkasi yaitu Solo dan Makassar, sementara Aviastar belum menjelaskan kesanggupannya. Sehingga untuk saat ini kami baru bisa mengandalkan Garuda dan Saudi Airlines,” jelas Mangindaan.

Ia melanjutkan, untuk maskapai tersebut Kementerian Perhubungan juga memiliki sanksi dan *punishment* yang tercantum dalam kontrak kerja antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan perusahaan penerbangan tersebut. Hal tersebut semata-mata untuk mendapatkan garansi atas pelayanan prima terhadap jamaah haji. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Daging Sapi

Ketua Komisi IV DPR RI M. Romahurmuziy menilai pemerintah saat ini berada ditengah dua pilihan yang sama pentingnya, mengejar target swasembada daging sapi tahun depan atau menekan harga yang semakin melambung tinggi. Namun sebagai wakil rakyat ia melihat kepentingan utama saat ini adalah menekan harga yang sudah diluar jangkauan masyarakat.

“Yang jadi konsen kita sekarang adalah level harga daging sapi yang tercipta sejak Idul Fitri tahun lalu harus diturunkan. Karena ini menghancurkan peternak, konsumsi jadi rendah. Menghancurkan konsumen karena level kesejahteraan turun disebabkan harga daging sapi mahal,” katanya kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam acara Bedah Kasus; Karut Marut Impor dan Masa Depan Swasembada Daging Sapi yang diselenggarakan PWI di Jakarta, Rabu (6/3/13).

Ia mencatat penurunan kuota impor pada tahun 2012-



Ketua Komisi IV DPR RI M. Romahurmuziy.

2013 telah mengakibatkan harga cukup tinggi. Baginya apabila pemerintah bisa menjamin harga dapat ditekan dengan posisi importasi sekarang maka kebijakan itu harus dipertahankan. Kalau tidak berarti kuota impor mungkin perlu ditinjau.

“Kami di Komisi IV tidak dalam posisi mencampuri, pemerintahlah yang tahu titik ideal antara supply dan demand,” tekan politisi dari Fraksi PPP yang biasa dipanggil Romi ini.

Masukan publik yang berhasil dihimpun komisinya pada saat rapat dengan sejumlah asosiasi peternak dan kunjungan kerja lapangan, level harga rasional berkisar antara Rp. 70 - 80ribu/kg. “Sekarang ada yang diatas Rp. 100ribu/kg. Kita hanya minta harga daging sapi harus turun bagaimana caranya seperti me-

ambah pasokan, terserah saja mau dari dalam atau dari luar,”pungkas dia. (iky)

Komisi V Desak Kemenpera Selesaikan BSPS TA 2012

Komisi V mendesak Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk menyelesaikan semua permasalahan Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) TA 2012 paling lambat pada akhir Maret 2013. Kemenpera juga harus segera menyelesaikan pembayaran Dana Bantuan Operasional (BOP) dan gaji Tim Pendamping Masyarakat (TPM).

”Permasalahan BSPS di antaranya menyangkut pembayaran 100 persen kepada penerima BSPS berdasarkan SK yang telah dikeluarkan oleh Kemenpera. Termasuk untuk segera menyelesaikan hal-hal yang diamanatkan oleh UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman



Wakil Ketua Komisi V Mulyadi berjabat tangan dengan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz.

dan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun termasuk menyangkut kelembagaan Kementerian dan Badan-badan,” tegas Wakil Ketua Komisi V Mulyadi ketika rapat kerja antara Komisi V dengan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz dan jajaran di Gedung Nusantara DPR RI, Rabu (6/3).

Komisi V juga meminta Kemenpera untuk mempublikasikan seluruh nama Kepala Keluarga (KK) dan alamat penerima bantuan Program Rumah Swadaya berdasarkan SK Kemenpera tahun anggaran 2012, struktur organisasi dan personelnnya serta Tim Pendamping Masyarakat di masing-masing Kabupaten/Kota di website Kemenpera, agar tercipta transparansi dan akuntabilitas publik.

Mulyadi juga menegaskan agar Kemenpera segera menyelesaikan tindak lanjut semua rekomendasi atas 28 temuan pada hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2012 dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

“Dari 33 temuan semester I tahun 2012, sebesar Rp 876 juta sudah disetor ke kas negara pada Januari 2013 lalu, namun belum dilakukan pemutakhiran di BPK. Karena pemutakhiran baru akan dilakukan di Semester I tahun 2013,” ujar Djan Faridz.(sf)/foto:iwan armanias/parle.

Fee Untuk Kurator Telkomsel Tidak Wajar



Wakil Ketua Komisi VI Erik Satrya Wardhana berbincang dengan Direksi PT. Telkom, Direksi PT. Telkomsel, dan Deputi Kementerian BUMN.

Komisi VI DPR RI menilai tuntutan pembayaran fee untuk kurator tidak wajar. Demikian terungkap dalam RDPU Komisi VI dengan PT. Telkom, PT. Telkomsel, dan Deputi Kementerian BUMN, di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (6/3). PT. Telkomsel selama ini,

memang, tidak mau membayar fee kurator, karena dianggap melanggar asas kepatutan dan kewajaran. Tuntutan fee yang harus dibayar Rp 146,800 miliar.

Erik Satrya Wardhana (F-Hanura) Wakil Ketua Komisi VI yang memimpin rapat mengatakan, “Telkomsel lolos dari lubang jarum.” Erik dalam rapat tersebut juga mengungkapkan bahwa aturan pembayaran fee kurator tidak jelas, ketika tuntutan pailit dibatalkan pengadilan. “Ini masalah spesifik. Siapa yang membayar fee bila pailit tidak jadi,” tambahnya.

Direksi Telkomsel dalam rapat terse-

but juga mengungkapkan, selama ini Telkomsel tidak pernah dilibatkan dalam pembicaraan soal fee kurator. Pengadilan Niaga Jakarta, menurut pihak Telkomsel, telah melampaui kewenangannya. Ini kesalahan dan kekeliruan majelis hakim yang menyidangkan perkara pailit.

Sementara atas putusan kasasi MA tersebut, PT. Prima Jaya Informatika yang menuntut pailit, juga telah mengajukan peninjauan kembali ke MA. Jadi, kasus ini tampaknya akan semakin panjang dan bermasalah. Rapat yang dihadiri jajaran direksi Telkom dan Telkomsel itu, juga dihadiri Aria Bima (F-PDI Perjuangan) Wakil Ketua Komisi VI yang mendampingi pimpinan rapat. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

Emir Moeis: Tidak Ada Alasan Untuk Menolak Agus Martowardojo



Ketua Komisi XI Emir Moeis berbincang dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk menolak Agus Martowardojo menjalankan *fit and proper test* sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI). Agus Martowardojo merupakan Menteri Keuangan yang menjadi calon tunggal Gubernur BI yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada DPR. Menurut Emir, secara substansi Agus cocok menjadi Gubernur BI.

“Saya yakin, dari segi kualitas, Agus sudah sangat mampu. Pengalaman beliau selama 3 tahun sebagai Menteri Keuangan kan bukan pengalaman yang sebentar, pasti punya pengalaman yang banyak,” ujar Emir ketika ditemui wartawan sebelum rapat internal pembahasan perintah Badan Musyawarah kepada Komisi XI untuk membahas Calon Gubernur BI, di Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa (5/3).

Namun, ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran Emir mengenai penunjukan Agus menjadi calon Gubernur BI. Faktor ekonomi dunia yang semakin meredup, pemotongan anggaran dari Amerika, dan terjadi pergantian Menteri di Kementerian Keuangan menjadi pertimbangan apakah tetap melanjutkan proses pencalonan Agus.

“Tiba-tiba ada pergantian Menteri Keuangan kan harus menjadi pertimbangan juga. Hal ini yang juga menjadi kekhawatiran saya. Namun, tetap ada unsur politik juga yang turut menjadi pertimbangan,” pungkas Emir.

Emir menilai akan lebih baik jika calon yang diajukan menjadi calon Gubernur BI lebih dari 1. Jika calon lebih dari 1, akan terlihat mana calon yang lebih baik dibanding kompetitornya.

“Lebih enak calonnya tidak tunggal. Kalau cuma tunggal, jika tidak terpilih kan jadi tidak enak. Tapi itu kan sudah jadi hak prerogatif presiden,” ujar Emir. (sf)/foto:iwan armanias/parle.

Kerja Sama Bisnis Perminyakan Indonesia-Irak Segera Terealisasi



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menerima cinderamata dari Duta Besar Irak untuk Indonesia Dr. Ismieal Shafiq Muhsin.

Kerja sama bisnis sektor perminyakan segera terealisasi antara pemerintah Indonesia yang diwakili PT. Pertamina dengan perusahaan minyak milik pemerintah Irak. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengungkapkan agar kesempatan ini betul-betul dimanfaatkan Indonesia terutama oleh Pertamina.

“Pertamina diberi kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Mohon dimanfaatkan dengan baik,” kata Pramono kepada Parlemen usai menerima kunjungan Duta Besar Irak untuk Indonesia Dr. Ismieal Shafiq Muhsin di ruang kerjanya, Gedung DPR Senayan, Rabu (6/2). Kunjungan Duta Besar Irak ini, menindaklanjuti kunjungan Perdana Menteri Irak ke DPR RI beberapa waktu lalu.

Irak, lanjut Pramono, telah memberi kesempatan luas kepada para pebisnis Indonesia terutama di sektor perminyakan untuk menjadi kontraktor di negara yang pernah dipimpin Sad-

dam Hussein itu. Produksi minyak Irak saat ini sudah hampir 3,1 juta barel per hari. Itu berarti hampir 3 setengah kali produksi minyak kita per harinya.

Pramono juga menjelaskan, pemerintah Irak sangat berharap agar pihak Pertamina segera merealisasikan keinginannya menjalin kerja sama dengan pemerintah Irak. Apalagi Menko Perekonomian Hatta Rajasa dijadwalkan berkunjung ke Irak pada 14 Maret mendatang.

“Saya diminta untuk mengingatkan agar Pertamina dan pemerintah itu sungguh-sungguh menyambut penawaran yang diberikan oleh pe-

merintah Irak. Sebetulnya ini kesempatan yang luar biasa. Sayang kalau kemudian dilewatkan oleh Pertamina,” ungkap Pramono. Pertamina sendiri ingin masuk ke level menengah dari kerja sama bisnis ini.

Padahal, pemerintah Irak, seperti disampaikan Duta Besar, siap bila Pertamina menginginkan kerja sama bisnis yang lebih besar. “Kebijakan ini ada pada pemerintah, sehingga peran parlemen adalah mendorong, memfasilitasi, dan mengingatkan, karena memang parlemen, kan, tidak boleh berbisnis. Itulah yang bisa kita lakukan,” tutur Pramono mengakhiri perbincangan. (mh)

Baleg DPR Himpun Masukan AMTI dan KNPK Terkait RUU Pertembakauan



Pengurus AMTI (Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia) dan KNPK (Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek) ketika rapat dengan Baleg mengenai RUU Pertembakauan.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI meminta masukan AMTI (Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia) dan KNPK (Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek) terkait RUU Pertembakauan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Kepada Baleg AMTI dan KNPK meminta DPR supaya bertindak adil dalam pembuatan Undang-undang Pertembakauan. Koordinator AMTI, Muhaimin Mufti kepada Baleg yang dipimpin Sunardi Ayub Selasa (5/3) siang mendesak DPR jangan hanya melihat dari satu sisi, kesehatan saja. Pertimbangkan juga industri rokok tanah air yang didalamnya terdapat jutaan anggota masyarakat termasuk para petani tembakau yang mata pencariannya utamanya dengan bertanam tembakau. Bahkan tembakau selama ini sudah memberikan sumbangsih yang tidak sedikit bagi APBN.

“Kalau mau berbicara masalah kesehatan, ya harus menyeluruh. Kenapa tidak sekalian melarang seluruh produk alkohol masuk ke Indonesia, bahkan polusi kendaraan bermotor, pabrik yang jelas-jelas menjadi penyebab kematian harus benar-benar dibersihkan. Jadi jangan hanya tembakau saja yang dibatasi atau dilarang,” jelas Muhaimin.

Lebih lanjut Muhaimin meminta DPR untuk menghapuskan Peraturan Pemerintah (PP) 109 tahun 2012 yang menjadi turunan dari Undang-undang Kesehatan No.36 tahun 2009 pasal 113 dan 116.

Senada dengan AMTI, Koordinator KNPK Nurtantio Wisnu Brata mengatakan, DPR harus membuat Undang-undang yang komprehensif, yang bisa mengakomodir seluruh kepentingan dan bukan untuk mengeliminasi salah satu pihak, yakni masyarakat pertembakauan saja. Lebih lanjut Wisnu mengungkapkan bahwa Amerika sengaja membuat kebijakan dalam negerinya dengan standarisasi yang mengeliminasi masuknya rokok kretek ke negaranya.

“Peraturan tersebut diambil pemerintah Amerika untuk melindungi industri rokok putih dalam negeri mereka yang tidak menggunakan tembakau. Sementara di negara kita jika ikut mengadopsi peraturan tersebut jelas-jelas merugikan industri pertembakauan tanah air yang sebagian besar masih mengunggulkan produk rokok kretek,” tambah Wisnu.

Padahal menurut Wisnu industri rokok tanah air sudah berinovasi lewat rokok Mild untuk mengakomodir peraturan pemerintah (PP) 81 yang menyatakan bahwa kadar nikotin dalam rokok tidak boleh lebih dari 1,3 mg.

AMTI dan KNPK menilai bahwa pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan hanyalah skenario modal asing, yang bertujuan mengambil nilai lebih dari industri pertembakauan nasional. Dengan kata lain ada desakan dari perusahaan asing untuk merebut konsumen rokok di Indonesia lewat produk rokok putih yang diproduksi.

sinya.

Sementara itu anggota Baleg, Poempida Hidayatulloh sependapat dengan AMTI dan KNPK, jika ingin fokus tentang kesehatan jangan setengah-setengah, harus menyeluruh, termasuk aturan yang jelas tentang alkohol.



Anggota Baleg Poempida Hidayatulloh.

“Drink and driving tidak ada aturannya sama sekali. Padahal ini jelas lebih berbahaya dari tembakau,” ungkap Poempida.

Diakhir rapat, pemimpin rapat Sunardi Ayub mengungkapkan bahwa masukan dari AMTI dan KNPK akan sangat berguna bagi Baleg dan DPR RI secara keseluruhan dalam menyusun Undang-undang Pertembakauan yang bisa mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat. (Ayu)

Komisi XI Pertanyakan Pembangunan Bandara di Kulon Progo

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Hatta mempertanyakan kebutuhan untuk membangun bandara di Kulon Progo, DI Yogyakarta. Hatta mengkhawatirkan kepindahan bandara dari Adisutjipto, Yogyakarta ke Kulon Progo dapat menimbulkan masalah.

“Pusat kegiatan di Provinsi Yogyakarta itu kan ada di Yogyakarta-nya. Kalau nanti dipindahkan ke Kulon Progo, akan menambah waktu tempuh atau perjalanan karena jaraknya yang cukup jauh,” ujar Hatta di Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura I (AP I) Persero Tommy Soetomo dan jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Senin (4/3) sore.

Ia menilai, bahwa volume pembangunan di bandara Adi Sutjipto Yogyakarta cukup padat, sedangkan bandara terdekat Adi Sumarmo di Solo cukup lenggang. Hatta mempertanyakan kenapa tidak memaksimalkan bandara yang sudah ada, tidak perlu membuat bandara yang baru. Sehingga, bandara Adi Sumarmo yang selalu merugi, dapat dimaksimalkan. Selain itu, bandara di Solo ini juga sudah termasuk bandara internasional untuk haji.

Namun, Tommy Soetomo menyatakan pihaknya tetap bersikeras meneruskan pembangunan bandara yang baru di Yogyakarta, yaitu di Kulonprogo. Lokasi tersebut dianggap sudah memenuhi studi kelayakan.

“Bandara di Yogyakarta saat ini merupakan pusat militer. Jadi, setiap ada pesawat yang ingin mendarat, biasanya selalu ada yang terganggu. Ini yang menjadi alasan sejak dua tahun lalu kami mengusulkan untuk pindah,” tandas Tommy.

Saat ini, tambah Tommy, dari 13 bandara yang dikelolanya, hampir separuhnya berdiri di atas tanah bukan milik perseroan. Artinya tanah yang dipakai masih sewa dengan



Anggota Komisi XI DPR Muhammad Hatta.

Pemerintah Daerah setempat. Dengan kondisi tersebut, bandara yang berada di atas tanah Pemerintah Daerah kurang bisa dikembangkan menjadi bandara yang komersial, khususnya di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, ditambah dengan kondisi di sekitar bandara yang memang padat dengan kondisi militer.

Rencananya, pembangunan bandara baru di Kulon Progo ini juga nanti akan diintegrasikan dengan jalur kereta api bandara, satu konsep dengan kereta api bandara yang ada saat ini beroperasi di Yogyakarta. Hal ini untuk mengantisipasi jarak yang jauh antara Kulon Progo dengan pusat kota Yogyakarta.

Dalam paparannya, Tommy juga menjelaskan enam bandara malah menjadi rugi. Hal ini diakibatkan karena kurangnya jumlah penumpang, yaitu kurang dari 3 juta per tahun. Kendati demikian secara keseluruhan Angkasa Pura I tetap membukukan keuntungan karena tujuh bandara lainnya mencatatkan keuntungan yang lebih besar. Laba kotor yang dibukukan AP I mencapai Rp 878, 851 miliar pada 2012. Jumlah ini naik ketimbang laba kotor 2011 yang hanya sebesar Rp 656,353 miliar.

Bandara yang mengalami kerugian diantaranya; Bandara Selaparang Mataram NTB sebesar Rp 49,258 miliar, Bandara El tari, Kupang NTT Rp 7,137 miliar, Bandara Frans Kaisiepo, Biak Papua : Rp 23,805, Bandara Adisumarmo, Surakarta Jawa tengah : Rp 22,476 miliar, Bandara Pattimura, Ambon Maluku : Rp 22,874 miliar, dan Bandara Sam Ratulagi, Manado Sulawesi Utara : Rp 3,852 milar. (sf)

Komisi IX akan Panggil Paksa Meneg BUMN

Komisi IX DPR RI memutuskan akan memanggil paksa Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, pasalnya sudah tiga kali tidak menghadiri rapat kerja dengan komisi yang membidangi Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Keputusan tersebut disampaikan Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning saat menutup Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan sejumlah Dirut BUMN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3)

“Komisi IX DPR RI akan memanggil paksa Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait ketidakhadiran Menteri BUMN pada rapat kerja untuk yang ketiga kalinya, sesuai dengan Pasal 72 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 190 Tata Tertib DPR,” kata Ribka.



Ribka menyatakan, bahwa pemanggilan paksa terhadap Dahlan Iskan akan dilakukan pada 14 Maret 2013, dan surat pemanggilan paksa itu juga akan ditujukan kepada Kapolri melalui pimpinan DPR RI.

Menurutnya, Komisi IX juga akan menggunakan hak interpelasi atas kebijakan Kementerian BUMN.

“Komisi IX DPR RI sepakat menggunakan hak interpelasi atas kebijakan Kementerian BUMN terhadap permasalahan Ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan BUMN,” paparnya. (sc)

Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning didampingi Wakil Ketua Supriyatno.

Arief Hidayat Dipilih Karena Tegak Bersikap



Prof. Arief Hidayat, calon terpilih Hakim MK.

Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika mengatakan terpilihnya Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang Prof. Dr. Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi karena ketegasannya dalam mengambil sikap pada saat uji kepatutan dan kelayakan. Baginya ketegasan dan keberanian seseorang penting dalam mengemban tugas sebagai hakim.

“Penampilan Prof. Arief dari sudut konten konstitusi ia menguasai. Ketika diajukan pilihan-pilihan sikap, dia juga tegas dan berani. Misalnya soal perkawinan sejenis dia tegas, antara HAM dengan bagaimana kultur Indonesia. Jadi kete-

gasan dan keberanian seperti itu yang bisa dikembangkan di MK nanti,” kata Pasek kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/3/13).

Ia menjelaskan terpilihnya Arief menggantikan Mahfud MD yang memasuki masa pensiun tidak otomatis menjabat Ketua MK. “Dia menggantikan posisi Hakim Konstitusi sedangkan jabatan ketua dan wakil itu urusan disana, pemilihan diantara para hakim seperti di MA. Kita hanya memilih hakim menggantikan yang pensiun atau habis masa tugas,” imbuhnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan hasil rapat pleno Komisi III akan segera dibawa ke rapat Badan Musyawarah, selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan dewan.

Sebelumnya Rapat pleno Komisi III DPR RI berhasil menetapkan Prof. Dr. Arief Hidayat, SH, MH, Guru Besar Fakultas Hukum Undip sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Mahfud MD yang memasuki masa pensiun.

Putusan diambil lewat mekanisme pemungutan suara.

Dalam pemungutan suara Prof. Dr. Arief Hidayat memperoleh 42 suara, dan dua kandidat lain Dr. Sugianto, dosen IAIN Sunan Gunung Djati, Cirebon memperoleh 5 suara dan Dr. Djafar Albram, SH akademisi/lektor Universitas Borobudur, Jakarta dengan 1 suara. Dalam acara ini 6 anggota tidak memberikan suara karena berhalangan hadir.(iky) foto:wy/parle

Komisi III Pantau Sidang Praperadilan Raffi Ahmad



Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika.

Komisi III DPR RI akan memantau jalannya sidang praperadilan artis Raffi Ahmad yang diduga tersangkut kasus narkoba. Pemantauan ini untuk memastikan hak-hak sebagai warga negara dalam proses peradilan tidak dihalangi oleh siapapun, termasuk oleh BNN.

“Kita lihat kalau Raffi tidak dihadir-

kan di pengadilan, sementara itu hak dia tentu ada yang salah disitu. Dalam posisi ini tentu kita perlu melindungi hak seseorang. Kami akan memantau karena proses hukum tidak bisa kita intervensi, biar hakim yang menilai,” kata Ketua Komisi III, Gede Pasek Suardika saat menerima aspirasi Ibunda Raffi Ahmad di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/13).

Ia menekankan negara wajib memberikan perlindungan kepada warga negara, jangan sampai dikriminalisasi. Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap BNN dapat memberikan hak Raffi selama dalam persidangan. “Tidak perlu dihalangi datang ke pengadilan. BNN itu prestasinya banyak, jangan karena hal kecil jadi bumerang tidak bagus,” tandasnya.

Sebelumnya pengacara Raffi Ahmad, Hotma Sitompul mengungkap dalam sidang praperadilan BNN ternyata tidak menghadirkan Raffi. Padahal menurut aturan perundang-undangan sidang tersebut adalah hak pemohon agar dapat memaparkan argumennya dihadapan hakim.

Ia juga mempertanyakan keputusan BNN menggunakan PP no.25/2011 untuk mengirim Raffi ke panti rehabilitasi. “Pasal dalam PP itu menyebut BNN, penyidik, jaksa bisa mengirim pecandu untuk direhab. Ini yang kami lawan karena Raffi bukan pecandu. Tes darah, rambut dan urinya di BNN dan RSKO terbukti negatif.” Baginya orang sehat memasuki panti rehab itu berbahaya, datang sehat keluar bisa jadi tidak sehat. (iky) foto:ry/parle



Hotma Sitompul dan ibunda Raffi Ahmad, Amy Qanita.

DPR Sesalkan Proyek MRT Jakarta Tak Libatkan PT KAI



Dirut PT KAI Ignasius Jonan beserta jajarannya.

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Hatta menyesalkan sistem pengelolaan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta atau sistem pengangkutan gerak cepat di Jakarta yang tidak melibatkan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

Dia menilai, penyediaan jasa transportasi massal adalah usaha yang prestisius sekaligus prospektif. “Kenapa MRT tidak dikelola PT KAI. Betapa luar biasanya bisnis ini. Bahkan di Hongkong, bisnis ini sangat menggurita. Sangat jelas bisnis ini sangat menguntungkan,” jelas Hatta saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XI dengan Dirut PT KAI Ignasius Jonan beserta jajarannya di Gedung Nusantara I, Senayan (4/3).

Menurut Hatta, Singapura dan Hongkong menempatkan MRT sebagai transportasi utama sekaligus bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan besar. “Seharusnya MRT dapat dikelola oleh perusahaan milik negara, bukan justru malah dikuasai pihak asing. Kenapa tidak diproteksi, ada kendala apa, dan kenapa malah perusahaan asing JICA (*Japan International Corporation Agency*) yang terlibat. Apa yang terjadi? Giliran bisnis yang menguntungkan, melibatkan pihak asing. Tapi ketika bagian bisnis yang rugi dikelola oleh orang kita sendiri,” sesal Hatta saat rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI Andi Timo Pangerang itu.

Menanggapi pernyataan dari Hatta, Dirut PT KAI Ignasius Jonan membenarkan bahwa PT KAI tidak terlibat dalam proyek MRT Jakarta. PT MRT Jakarta dimiliki dua pihak, Pemda Provinsi DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya. Untuk menopang biaya proyek ini, Indonesia menerima pinjaman dari JICA.

“Dalam UU Perkeretaapian, PT KAI tidak lagi memonopoli kegiatan perkeretaapian. Kami hanya menguasai jalur yang sudah ada. Untuk pengembangan jalur baru termasuk MRT Jakarta, swasta dan Pemprov DKI Jakarta kami persilakan untuk terlibat,” jelas Jonan.

Dalam proyek MRT Jakarta ini, tambah Jonan, PT KAI hanya terlibat dalam peranan konsultatif. PT KAI siap membantu apabila pihak yang terlibat dalam proyek membutuhkan saran dari PT KAI. (sf/si). foto:ry/parle

Panja RUU Keantariksaan Pertanyakan Kualitas Alat di Pontianak



Anggota Komisi VII DPR Azwir Dainyara.

Anggota DPR dari Partai Golkar Azwir Dainyara mempertanyakan standar fasilitas atau alat yang digunakan Lapan, di Balai Dirgantara, Pontianak. “Dari alat yang ditampilkan kalau melihat ukurannya ini apakah sesuai standar atau tidak,” tanyanya saat Kunjungan Spesifik RUU Panja Keantariksaan ke Kalimantan Barat, yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Soetan Bhatogana, di Balai Dirgantara, Pontianak, baru-baru ini.

Menurutnya, riset yang dilakukan oleh Lapan seharusnya *onestop service*, pasalnya, banyak riset yang dilakukan itu menyebar di seluruh Kementerian dimana-mana. “Begitu juga soal riset Lingkungan Hidup, dimana memung-

kinkan dikerjakan oleh peneliti di Lapan,” tambahnya.

Sementara Alimin Abdullah (F-PAN) mengharapkan RUU Keantariksaan dapat berguna bagi Rakyat Indonesia. “artinya Jangan sampai setelah ada UU ternyata tidak ada manfaatnya bagi rakyat, karena itu ini harus dijelaskan kepada rakyat bagaimana UU ini nantinya melindungi rakyat Indonesia,” paparnya.

Menurutnya, jangan sampai UU Keantariksaan hanya sebagai pelengkap saja dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Milton Pakpahan (F-PD) mengatakan, saat peninjauan ke Brasil ada beberapa pilar yang mendukung keantariksaan ini, seperti Angkatan Udara, TNI dan lembaga lainnya. “Kita tidak ada sinergi yang fokus bersama, intinya apakah membentuk badan baru, sehingga

lebih fokus dan perlu diberikan ruang didalam RUU ini,” paparnya.

Dia menambahkan, seharusnya Lapan lebih fokus dalam meningkatkan fasilitas khususnya daerah khatulistiwa. “Aset kita ini menyebar harusnya lebih fokus aja di daerah khatulistiwa, seperti Palu ataupun Pontianak,” katanya. (si)

Kesejahteraan dan Kecerdasan Penting Bagi Guru

Wacana pembahasan kurikulum 2013 jadi topik yang selalu menarik di kalangan para pakar pendidikan, pemerintah, dan parlemen. Kurikulum menjadi alat satu-satunya untuk membangun visi dan misi pendidikan nasional. Namun, kita kerap lupa bahwa instrumen penting dalam kesuksesan kurikulum itu adalah keberadaan para guru. Harus diakui, pemerintah masih belum maksimal memberi perhatian pada para tenaga pendidik di sekolah.

Demikian disampaikan Anggota Panja Kurikulum Komisi X DPR, Itet Tridjajati Sumarijanto (F-PDI Perjuangan), Jum'at (1/3), saat ditemui Tim Parle di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin-Makassar. “Pengayaan guru itu ada dua yang penting, pengayaan kesejahteraan dan pengayaan intelektualnya. Sekarang guru secara intelektual sudah dilengkapi dengan kursus. Tapi, dia tidak bisa konsentrasi ketika kesejahteraannya sendiri tidak terpenuhi,” tandas Itet.

Kalau guru masih sibuk mencari kesejahteraan untuk dirinya, dia tidak bisa fokus pada pengajarannya. Tapi, bila guru hanya sibuk mencari tambahan kesejahteraan, akhirnya metode pengajarannya terbelengkalai. Realitas ini masih banyak kita temui di dunia pendidikan. Di sinilah masalahnya. Bagaimana mau menyukseskan kurikulum 2013 yang dikampanyekan Kementerian Pendidikan Nasional, bila kondisi para guru kita masih seperti itu.

Menurut Itet, tidak ada salahnya bila para guru itu kita kirim ke luar negeri untuk belajar

banyak hal untuk mendapatkan pengayaan. “Guru-guru itu selain dikursuskan, beri juga mereka wawasan. Kirim mereka ke luar negeri. Jadi, bukan studi banding, tetapi penelitian kecil-kecilan lah,” harap Itet. Dengan begitu, para guru bisa mengembangkan sendiri kurikulum yang diberikan pemerintah.

Ditanya soal penerapan kurikulum 2013 di daerah-daerah, Itet menjelaskan, sejauh ini para guru di daerah belum sepenuhnya mengerti tentang kurikulum tersebut. Pemerintah pusat sendiri, lanjut Itet, masih harus dipertanyakan kesiapannya membantu daerah. Yang di daerah pun anggarnya patut dipertanyakan, apakah mereka sudah siap sehingga tidak banyak bergantung pada pusat.

Itet mencontohkan, di Samarinda tingkat kesejahteraan para gurunya sangat baik. Tapi, mereka belum mendapat pengayaan intelektual. “Samarinda kekurangannya di situ. Jadi, harus betul-betul komprehensif,” ungkap Itet. Sekali lagi pemerintah jangan hanya melihat kurikulum, tapi kesejahteraan dan kecerdasan guru juga patut diperhatikan.

Banyak hasil pantauan langsung ke daerah yang segera ingin disampaikan kepada pemerintah pusat menyangkut rencana penerapan kurikulum 2013. Ternyata, kondisi di daerah tidak seragam. Sebagian daerah ada yang sudah maju di bidang pendidikan. Sebagian lain masih jauh tertinggal. “Saya kira harus saling mendengarkan dan kemudian kita carikan solusinya yang paling cocok bagaimana. Saat berkunjung ke daerah, ada beragam pendapat yang kita dapati. Keragaman ini yang harus kita hargai dan itu yang harus kita dengarkan.” (iw)/foto:iwan armanias/parle.



Anggota Panja Kurikulum Komisi X DPR, Itet Tridjajati Sumarijanto.

Perlu Pendampingan Dalam Penerapan Kurikulum 2013



Anggota Komisi X Zulfadhli.

Ketua Tim Panja Kurikulum 2013 Komisi X DPR RI Utut Adianto menegaskan, penerapan kurikulum 2013 masih dalam proses. Tim akan melakukan kunjungan kerja ke berbagai Provinsi di Indonesia baru mengambil keputusan.

Kegiatan Panja Kurikulum 2013 Komisi X DPR RI yang sudah dilaksanakan melalui kunjungan spesifik diantaranya Solo dan

Manado, Samarinda dan Palembang serta Makasar dan Pontianak sejak akhir tahun lalu hingga Februari 2013.

“Hampir semua *stakeholder* merasakan sangat terburu-buru/tergesa-gesa dalam menyikapi kurikulum 2013 ini. Pertanyaannya, apakah bisa jalan sekarang atau tidak dan menurut saya bisa,” ujar Utut ketika bertemu dengan kalangan akademisi dan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, pekan lalu.

Ia menegaskan, untuk mensukseskannya harus diperkuat dengan pelatihan dan pendampingan terhadap guru. Jika tidak didampingi, meskipun ada pelatihan tetap saja hasilnya tidak optimal. Karena itu ia meminta keseriusan dan kecermatan semua pihak ketika pelaksanaan nanti.

“Kebijakan ini kewenangan Pemerintah, bukan kita. Kemudian permasalahan Kepala Sekolah yang disibukkan de-

ngan urusan lain. Hal tersebut merupakan problem yang desentralisasikan. Namun, nanti mereka akan terbiasa. Kepala Sekolah harus mengerti tentang administrasi,”ujarnya.

Dijelaskannya Komisi X DPR RI akan mengambil keputusan mengenai kurikulum 2013 terutama untuk penganggaran pada pertengahan minggu depan.

Menurut dia, hingga kini masih ada anggaran untuk buku yang belum disetujui sehingga panitia kerja harus mengkaji terlebih dahulu. Dijelaskan, pemerintah bersikeras akan memberlakukan kurikulum 2013 pada juli 2013 ini, sedangkan masih ada beberapa hal yang belum terselesaikan.

“Komisi X DPR RI akan menitikberatkan untuk pelatihan guru, buku pegangan untuk guru dan murid,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Zulfadhli, Anggota Komisi X DPR RI FPG dari Dapil Kalbar menambahkan, hingga kini belum ada lembar yang jelas dari kurikulum 2013.

“Baru sekedar rencana-rencana. Tetapi kita tidak bisa menghambat karena Pemerintah yang berhak untuk mengubah kurikulum,” kata Zulfadhli.

Ia menegaskan, Komisi X DPR hanya bisa mengawal agar tidak ada yang dirugikan, baik murid maupun guru. Hingga kini anggaran untuk pelatihan guru belum tersedia. “Ini gara-gara kurikulum yang belum siap,” katanya.

Anggaran terkait kurikulum 2013 dialokasikan sebesar 2,4 triliun dan harus ada kepastian agar siswa dan orangtua tidak lagi terbebani biaya untuk buku. “Karena buku nanti dicek oleh anggaran pusat,” ia menambahkan. (hr/mp), foto : hindra/parle/hr.



Kalangan Akademisi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar.

Untuk Keseimbangan, UU Keuangan Negara Perlu Diamandemen

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengatakan, untuk tercapainya keseimbangan dalam pembahasan RAPBN, maka sudah saatnya UU Keuangan Negara diamandemen. Dengan demikian DPR tidak harus membicarakan hal-hal yang menyangkut satuan tiga (program dan proyek) atau membahas hal-hal yang kecil dan mendetail.

“UU Keuangan Negara yang ada sekarang mengatur pembahasan RABN oleh DPR itu sampai satuan tiga. Kalau ada keinginan untuk dibatasi sehingga tidak membahas sampai satuan tiga ya diubah dulu UUnya,” ungkap Sohibul Iman menjawab Parlemen di ruang kerjanya Lantai IV Gedung Nusantara III Senayan, Jakarta.

Menyangkut pembahasan satuan tiga RAPBN, rapat konsultasi Pimpinan DPR dan Presiden pekan lalu juga disinggung bahwa Dewan mencoba mencari pemahaman bagaimana peran DPR dalam pembahasan satuan tiga dapat dikurangi, tetapi fungsi pengawasannya tetap sampai satuan tiga. Sehingga diharapkan pemerintah punya fleksibilitas dalam melaksanakan APBN, yang penting sarannya tercapai.

Sohibul Iman sebelumnya mengungkapkan latar belakang kenapa DPR sekarang ini membahas RAPBN sampai satuan tiga, karena dulu DPR seolah tidak pernah tahu apa yang

secara detail dilakukan pemerintah. Namun dalam perkembangannya, setelah DPR diberi kewenangan sampai satuan tiga, ternyata terlalu detail.

Karena itu menurutnya, perlu dicari satu keseimbangan. Satu sisi DPR tidak memberikan cek kosong kepada pemerintah, di sisi lain, pemerintah juga tidak berbuat seenaknya. “Tanpa membahas satuan tiga, maka DPR tidak terlalu dipusingkan dengan hal-hal yang sangat kecil,” ungkap Pimpinan DPR Koordinator Bidang Keuangan dan Perbankan ini.

Ketika ditanya, apakah benar tanpa membahas satuan tiga bisa menghapus kongkalikong anggaran, Sohibul mengatakan, sebenarnya dengan cara apa saja bisa untuk melakukan penyelewengan. Namun sambungnya, pihaknya bicara masalah efisiensi. “Kalau DPR sampai membahas sampai dengan satuan tiga, sangat tidak proporsional. Mungkin itu yang harus kita putihkan bersama,” tandas Politisi PKS.

Ia mengungkapkan Baleg DPR telah berinisiatif untuk mengamandemen UU Keuangan Negara. “Dari situ kita bicara bagaimana menemukan satu titik yang seimbang sehingga DPR tidak terlalu menukik sampai satuan tiga, tetapi juga pemerintah tidak sampai berbuat seenaknya,” ujar Sohibul Iman menambahkan. (mp) foto:ry/parle



Wakil Ketua DPR Sohibul Iman.

Komisi VII Kunjungi Fasilitas Kedirgantaraan Watukosek Mojokerto, Jatim



Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali (kanan) saat melakukan kunjungan ke Watukosek Mojokerto Jawa Timur.

Dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan Tim Kunjungan Lapangan Komisi VII DPR melakukan kunjungan ke Watukosek Mojokerto Jawa Timur. Kunjungan ini merupakan agenda untuk melihat secara langsung pemanfaatan fasilitas kedirgantaraan serta masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan arti pentingnya sistem regulasi keantariksaan.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali saat memimpin pertemuan dengan Pimpinan Balai Pengamatan Dirgantara Watukosek, Mojokerto, Jatim Bambang Setiahadhi, Kamis (28/2) siang.

Ia menambahkan, Komisi VII DPR saat ini memang sedang membahas RUU Keantariksaan, yang diarahkan untuk mewujudkan kemampuan sumber daya manusia yang profesional dalam penyelenggaraan keantariksaan, serta mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keantariksaan.

Selain itu mendorong terwujudnya industri rekayasa dan jasa keantariksaan, memanfaatkan sumber daya alam antariksa untuk selalu tersedia digunakan sebesar-besarnya secara berkelanjutan.

Lebih lanjut Zainudin menegaskan, antisipasi penanganan peristiwa antariksa dan dampaknya terhadap kehidupan

bermasyarakat sudah sewajarnya diatur dalam perundang-undangan sebagai payung hukum dalam pengembangan sains dan teknologi antariksa. Khususnya yang terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional).

“Undang-Undang ini nantinya diharapkan mampu menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Keantariksaan Nasional atau Indonesian National Space Policy yang di banyak negara menjadi acuan kebijakan nasional dan menjadi pendorong kemajuan kegiatan keantariksaan nasional,” tutur dia.

Pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan oleh Presiden RI didasari bahwa antariksa merupakan ruang beserta isinya yang terdapat di luar ruang udara yang mengelilingi dan melingkupi ruang udara, merupakan ciptaan Tuhan, dan diperlukan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Karena itu lanjutnya, hasil kunjungan ini dapat memberikan informasi yang cukup agar dapat menjadi dasar dan pertimbangan bagi Komisi VII DPR untuk mengambil kebijakan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, khususnya untuk pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan. (Spy).

Pemerintah Alokasikan Rp 150 Miliar Bagi Perpustakaan

Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Sri Sularsih menyatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 150 Miliar bagi Perpustakaan Nasional di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan, saat mendampingi Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ke UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Kamis (28/2).

"Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk keperluan penambahan koleksi buku yang akan disebar di seluruh perpustakaan maupun komunitas pecinta buku di seluruh Indonesia," kata Sri.

Menurut Sri, anggaran sebesar Rp 150 miliar tersebut, akan dialokasikan untuk pengelolaan perpustakaan di seluruh pemerintah provinsi sebesar Rp100 miliar, dan sisanya Rp 50 miliar untuk pengadaan buku yang nantinya akan disebar di seluruh perpustakaan termasuk milik komunitas.

Kondisi perpustakaan di Indonesia, terang Sri, sebenarnya saat ini sudah lebih baik daripada sebelumnya. Bu-



Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Sri Sularsih.

kan hanya di Pulau Jawa, di luar pulau ini pun kondisi perpustakaan juga sudah baik.

Dari sekitar 500 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, 467 di antaran-

ya sudah memiliki perpustakaan. Namun, tidak semuanya memiliki fasilitas yang lengkap seperti sistem "digital", maupun fasilitas lain di perpustakaan ini. Ada sekitar 30 persen dari seluruh daerah yang mempunyai perpustakaan yang fasilitasnya sudah lengkap.

Sri mengakui, bahwa masih ada beberapa daerah yang memerlukan perhatian untuk perpustakaan. Selain fasilitas yang belum lengkap, juga jumlah koleksi buku di perpustakaan tersebut masih minim. Daerah itu antara lain berada di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Sejak 2007 lalu, pemerintah memulai program untuk pemberian buku, yang memang ditujukan pada perpustakaan di wilayah pesisir maupun pulau kecil di Indonesia. Diharapkan, stimulan berupa buku ini akan menginspirasi bupati/wali kota di Indonesia untuk menambah anggaran sebagai upaya penambahan koleksi buku. (sc)



Tim Kunlap Komisi X mengunjungi UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar, Jawa Timur.

Komisi V Tinjau Dua Lokasi Kecelakaan Maut di Cianjur



Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama memimpin tim Komisi V melihat bangkai bus Mustika Mega Utama di dekat lokasi kecelakaan Ciloto, Cianjur.

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke dua lokasi kecelakaan maut di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Langkah ini dipandang perlu untuk menjawab keprihatinan publik atas dua kecelakaan beruntun dalam waktu 4 hari dengan korban meninggal 43 jiwa.

“Kita prihatin dengan kecelakaan beruntun yang terjadi. Kami memerlukan langsung turun ke lapangan untuk dapat melihat persoalan ini secara utuh. Kalau ternyata ada masalah kita dorong pemerintah untuk segera memperbaiki,” kata Ketua Komisi V, Laurens Bahang Dama saat meninjau lokasi kecelakaan truk di Jl Raya Sukabumi, Kampung Babakan, Gombong, Desa Songgom, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Jawa Barat, Kamis (28/2/13).



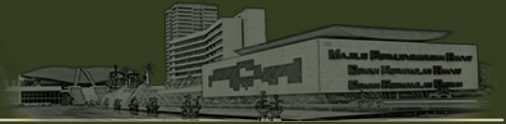
Tim Komisi V meninjau lokasi kecelakaan.

Dalam kunjungan di lokasi yang memakan korban 16 meninggal dunia ini, dia mendapat masukan diantaranya tentang buruknya kondisi jalan dan truk yang muatannya melebihi kapasitas. “Secara fisik kita melihat ada beberapa temuan, mungkin ada masalah lain seperti jam kerja sopir, jangan sampai terlalu banyak. Kita mesti panggil perusahaannya, kita ingin ini jangan sampai terulang,” tambahnya.

Sementara dalam peninjauan ke Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur tempat kecelakaan bus Mustika Mega Utama, Tim Kunjungan Spesifik memperoleh sejumlah informasi dari Kapolres Cianjur AKBP H Agustri Heriyanto. Bus yang seharusnya berkapasitas 58 penumpang ternyata membawa 75 orang. Karena kelebihan beban bus tidak dapat mengerem dengan sempurna. Korban dalam kecelakaan ini 17 meninggal, 26 luka berat dan 32 luka ringan.

“Kita lihat tidak ada rambu-rambu yang mengingatkan orang untuk hati-hati disini, padahal medannya cukup sulit. Kemudian juga kelayakan kendaraannya, ternyata bus yang digunakan ber-plat hitam bukan bus umum. Kita akan panggil pemilik angkutan ini agar bisa menyelesaikan persoalan secara utuh. Kasihan kok nyawa orang bisa hilang begitu mudahnya,” tegasnya.

Laurens mengatakan seluruh temuan lapangan akan didalami oleh Komisi V dan disampaikan dalam pertemuan dengan pemerintah serta pihak terkait lain dalam waktu dekat. (iky)



Tim Panja Kurikulum Komisi X DPR melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (foto kiri) dan Provinsi Jawa Timur (foto kanan) dalam rangka mencari masukan dan pandangan terkait Kurikulum 2013. (1/3/2013) foto: HR dab SC



Wakil Ketua DPR Pramono Anung menerima kunjungan Duta Besar Republik Irak untuk Indonesia Dr. Ismieal Shafiq Muhsin di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III DPR, (6/2/2013). foto:IV

Pengukuhan Sayed Fuad Zakaria sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, disaksikan Ida Fauziyah dan Jazuli Juwaini. (7/3/2013) Foto:OD



Komisi VII mengadakan Kunjungan spesifik mengenai RUU Keantariksaan ke Provinsi Kalimantan Barat (foto kiri) dan Provinsi Jawa Timur (foto kanan) untuk melihat pemanfaatan fasilitas kedirgantaraan serta permasalahannya menyangkut sistem regulasi keantariksaan. (28/2/2013) Foto:SI dan SPY